



News Title : Indonesia Sambut Kehadiran Bursa CPO	
Media Name : Bisnis Indonesia	Journalist : Artha Adventy
Publish Date : 21 September 2023	Tonality : Positive
News Page : 14	News Value : 450,000,000
Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)), Timbas Ginting (Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatra Utara), Achmad Maulizal Sutawijaya (Kepala Divisi Perusahaan BDPDKS), Piter Abdullah Redjalum (Direktur Eksekutif Segara Research Institute), Eugenia Mardanugraha (Ketua Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI))	Ads Value : 150,000,000
Section/Rubrication : Korporasi	Topic : Bursa CPO

| PEMBENTUKAN HARGA KOMODITAS |

INDONESIA SAMBUT KEHADIRAN BURSA CPO

Bisnis, JAKARTA — Jika tak ada aral melintang, Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (*crude palm oil/CPO*) atau Bursa CPO bakal diluncurkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada awal Oktober, setelah gagal dirilis pada Juni.

Artha Adventy
redaksi@bisnis.com

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Tirta Karma Senjaya mengatakan saat ini peluncuran Bursa CPO sedang dikoor-dinasikan dengan jadwal Menteri Perda-gangan Zulkifli Hasan dan diperkirakan akan terlaksana pada awal Oktober 2023.

"Sedang dikordinasikan dengan jadwal Bapak Mendag diperkirakan awal Oktober," katanya kepada *Bisnis*, Rabu (20/9). Menurut Tirta, sudah ada bursa berjangka komoditas yang telah mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pasar fisik CPO. Namun, dia enggan mengatakan secara spesifik siapa penyelenggara bursa berjangka yang dimaksud.

Saat ini terdapat dua bursa berjangka yang sudah berjalan yakni PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ/JFX) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI/ICDX).

Kedua bursa ini juga memperdagangkan produk CPO dan turunannya. Sementara itu dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 7/2023, disebutkan syarat-syarat bursa berjangka yang dapat menjadi penyelenggara bursa CPO, yaitu memiliki izin usaha, memiliki sistem perdagangan, pengawasan, dan pelaporan untuk penyelesaian perselisihan.

Penyelenggara bursa CPO juga harus memiliki peraturan dan tata tertib pasar fisik CPO, memiliki komite pasar fisik CPO, memiliki kajian atas keadaan pasar fisik CPO, serta memiliki kerja sama, kesepakatan, komitmen, dan pernyataan tertulis dengan calon peserta pembeli dan penjual.

Perdagangan pasar fisik CPO di bursa berjangka hanya dapat diselenggarakan melalui bursa berjangka yang telah memperoleh persetujuan Bappebti sebagai Bursa CPO. Transaksi jual beli pada pasar fisik CPO dilakukan dengan menggunakan sistem perdagangan secara elektronik atau *online*.

Pemerintah mengklaim bahwa pembentukan Bursa CPO dan kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka akan mendorong Indonesia untuk menciptakan harga CPO lebih mandiri, kompetitif, dan transparan. Adapun selama ini, perdagangan CPO Indonesia justru masih mengacu harga di luar negeri seperti di bursa Malaysia dan Rotterdam.

Sebelumnya, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatra Utara Timbas Ginting mempertanyakan alasan pemerintah yang ingin mem-

buat Bursa CPO sendiri sebagai acuan penentuan harga paku-paku, menurutnya, Indonesia telah memiliki bursa komoditas sawit yang dikelola PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

Menurutnya, pasar CPO yang dikelola selama ini oleh KPBN sudah baik, terbukti harga tersebut jadi acuan bagi perusahaan media global, Bloomberg dan Reuters dalam memantau harga komoditas sawit. "KPBN sudah menyelenggarakan bursa CPO bagi pelaku industri sawit di Indonesia sejak 1968. Jadi reputasinya sudah sangat baik, tinggal diperkuat saja," ujar Timbas kepada *Bisnis*, Selasa (19/9).

Dia berkeyakinan pengembangan bursa CPO di Indonesia penting mengingat sebagai produsen terbesar kelapa sawit di dunia. Produksi CPO Indonesia menyumbang 59% dari total produksi sawit dunia tetapi patokan harga ekspor CPO RI masih mengacu pada Bursa Malaysia (MDEX) dan Bursa Rotterdam, Belanda. BPS mencatat Indonesia memproduksi 45,5 juta ton CPO per tahun 2022. Malaysia sendiri hanya memproduksi 19,3 juta ton sawit per tahun, atau sekitar 25% dari produksi dunia. Data BPS pada 2022 juga menyebut, Indonesia mengekspor CPO dan produk turunannya sebanyak 25,01 juta ton.

Dengan memiliki bursa komoditas, katanya, Indonesia bisa membentuk dan memiliki acuan harganya sendiri atas dasar permintaan dan penawaran yang terjadi. Keuntungan lainnya, keberadaan bursa CPO dapat pula memengaruhi harga beli tandan buah segar (TBS) dari petani.

Seiring sejalan dengan rencana peluncuran bursa CPO, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga terus berupaya memperkenalkan bursa kepada berbagai pemangku kepentingan. Kepala Divisi Perusahaan BDPDKS Achmad Maulizal Sutawijaya mengatakan sosialisasi bursa CPO dilakukan kepada petani, perusahaan besar swasta

hingga importir. Sosialisasi bursa CPO telah menjadi salah satu program BDPDKS tahun ini untuk memastikan perdagangan CPO di dalam bursa berjangka berjalan lancar.

"Jadi tidak hanya persiapan infrastruktur, tetapi harus ada pengakuan dari pasar luar, bahwa Indonesia ini punya bursa CPO," kata Achmad belum lama ini.

Dia menyebut pihak Bappebti telah beberapa kali melakukan rekonsiliasi dengan bursa-bursa di luar negeri seperti di Amerika Serikat, dan Malaysia. "Memang secara pelaksanaannya minimal butuh setahun, atau kalau bisa 1,5–2 tahun. Kalau kita mau mulai sekarang, itu jadi sebuah tanda yang bagus," katanya.

HARGA PASAR

Dilansir dari Antaran, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalum belum lama ini menyatakan bahwa ekspor CPO melalui bursa berjangka Indonesia harus bersifat sukarela, tidak bersifat fisik, dan tidak dikaitkan dengan kewajiban pemenuhan pasar domestik (*domestic market obligation/DMO*).

"Oleh karena itu, pengaturan ekspor minyak sawit mentah melalui bursa berjangka Indonesia hendaknya tidak meng-intervensi pasar," katanya.

Dengan demikian, harga yang terbentuk di bursa sepenuhnya mencerminkan harga pasar yang dibentuk oleh pasokan dan permintaan. Dengan demikian, bursa menjadi kredibel dan bisa sebagai rujukan pasar global.

Pembentukan bursa CPO juga kerap dikaitkan dengan upaya Indonesia menhadapi kebijakan European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR) alias Undang-Undang Antideforestasi Eropa yang menghambat lalu perdagangan minyak kelapa sawit.

Sebelumnya, Ketua Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Eugenia Mardanugraha mengatakan Indonesia harus membangun pasar keuangan sa-



Jadi tidak hanya persiapan infrastruktur, tetapi harus ada pengakuan dari pasar luar, bahwa Indonesia ini punya bursa CPO.

wit yang mapan dan mendukung iklim usaha industri hingga dapat mengalahkan Uni Eropa. "Kalau semua pedagang sawit berdagang di bursa Indonesia, itu artinya keuntungan dari jasa perdagangan sawit bisa dinikmati sepenuhnya oleh Indonesia," kata Eugenia. Menurutnya, kebijakan EUDR yang mencegah impor produk-produk pertanian dan hutan terkait deforestasi ilegal tersebut tak lebih dari siasat Eropa menghambat kemajuan industri Indonesia, termasuk industri kelapa sawit.

Apalagi, masa depan industri sawit Indonesia ditentukan oleh mereka yang mengendalikan harga sawit internasional. Makin maju pasar keuangan atau bursa CPO Indonesia, Eropa makin kehilangan kekuatan untuk mengendalikan harga.

(Akhilah Rahmah Nurulita/ADB) E

Setelah Bursa Kripto, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berencana meluncurkan Bursa CPO pada awal Oktober. Ini akan menambah ramai bursa komoditas yang sudah ada saat ini.

Bursa Berjangka	No. Izin	Tgl. Izin
PT Bursa Komoditi Nusantara (CFX)	01/BAPPEBTI/Sl-BB/06/2023	2023-06-09
PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ/JFX)	02/BAPPEBTI/Sl/1/2000	2000-11-21
PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI/ICDX)	26/BAPPEBTI/KP/6/2009	2009-06-23

KLIRING • PT Indonesia Clearing House
• PT Kliring Berjangka Indonesia

ICDX	JFX	CFX
• Emas	• Minyak Sawit	• Produk Bilateral
• Minyak Mentah	• Minyak Sawit	• Minyak Sawit
• Yuluta Ating	• Minyak Mentah	• Aset digital
• Timah	• Minyak Mentah	• Aset digital
	• Minyak Mentah	• Aset digital

Sumber: Bappebti, BKDI, BBJ